

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....iv

KATA PENGANTAR.....vi

ABSTRAK.....x

DAFTAR ISI.....xii

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... xiv

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN xvi

BAB I PENDAHULUAN.....1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Rumusan Masalah..... 8

 1.3 Tujuan Penelitian 8

 1.4 Manfaat Penelitian 8

 1.5 Metode Penelitian 9

 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....15

**BAB II KEDUDUKAN BUKTI LAMA BERUPA LETTER C DESA
DALAM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH..... 17**

 2.1 Keabsahan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah..... 17

 2.1.1 Wewenang Penetapan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah..... 18

 2.1.2 Prosedur Penetapan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah..... 20

 2.1.3 Objek Penetapan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah 26

2.2 Hak Lama Berupa Letter C Desa Sebagai Alat Bukti Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah	29
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG BUKTI LAMA BERUPA LETTER C DESA DALAM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH	35
3.1 Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah yang Berasal Dari Bukti Lama Berupa Letter C Desa	35
3.2 Upaya Hukum dalam Hal Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah	39
3.2.1. Sengketa Sesama Alat Bukti Yang Belum Dikonversi	41
3.2.2. Sengketa Bukti Lama Yang Belum Dikonversi Melawan Sertipikat Hak Atas Tanah.....	43
3.3 Kajian Kasus Sengketa Tanah dengan Bukti Letter C Desa di Kabupaten Gresik	44
3.3.1. Kasus Posisi	44
3.3.2. Pertimbangan dan Putusan Hakim	46
3.3.3. Analisa Putusan	47
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3696)

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang
Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas
Tanah

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak
Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan
Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang
pedoman pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin
lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk. 26/DDA/1970 tentang
Penegasan Konversi Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas
Tanah

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 73/PDT.G/2018/PN.GSK